

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Partai politik di negara berkembang lebih banyak dimanfaatkan atau menginginkan partai politik tersebut menjadi organisasi yang dapat mempersatukan semua golongan, suku, agama dan latar belakang yang berbeda dalam sebuah negara yang satu. Partai politik didambakan dapat menyatukan seluruh kekuatan bangsa dan memajukan jati diri bangsa, menangani kemiskinan dan keterbelakangan terutama di negara-negara yang baru merdeka, karena kemiskinan dan kesetaraan di negara berkembang merupakan masalah yang mendesak dan sangat berisiko. Menurut Undang-Undang tentang Partai Politik, tujuan umum partai politik adalah melindungi dan menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPR RI, 2008) . Dalam Undang-undang juga mewajibkan partai politik untuk menciptakan suasana yang mendukung dan kondusif demi tercipta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bagi kepentingan masyarakat. (Jumadi, 2014) berpendapat bahwasannya partai politik merupakan salah satu dari perangkat demokrasi yang dimana ketika sebuah partai politik dapat memaksimalkan kualitas dan taraf dari demokrasi yaitu dengan melalui pemilu.

Partai politik berisikan kumpulan orang terorganisir yang dimana setiap anggotanya memiliki orientasi, nilai, keinginan dan harapan yang

sama. Tujuan kumpulan orang ini adalah untuk mendapatkan kekuasaan politik dan mengambil posisi jabatan politik serta melangsungkan kebijakannya secara konstitusional. (Jumadi, 2014) berpendapat juga bahwasannya dengan adanya pemilihan umum maka masyarakat dalam mewujudkan aspirasinya dapat disalurkan melalui partai politik, serta banyak kekuatan sosial masyarakat juga menyalurkan aspirasinya kepada partai politik. Partai-partai politik bertujuan untuk menduduki susunan pemerintahan dengan mengikutsertakan pemilu, sedangkan kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingannya. Negara Indonesia sendiri menciptakan partai politik dalam Pemilu pertama kali muncul yaitu semenjak pemilihan umum pada tahun 1955 yang dimana pemilu tersebut disebut-sebut sebagai Pemilu di Indonesia yang bersifat demokratis. Skema kepartaian pada saat itu merupakan skema yang disebut multi partai, yang bertujuan untuk meluruskan sistem pemerintahan yang sesuai dengan sifat demokrasi yang baik. Kegiatan partai politik di Indonesia semestinya dapat menunjukkan diri selaku agen pencerahan (Hutagalung, 2017). Partai politik berperan sebagai jembatan atau pihak ketiga diantara kubu yang memberi perintah dan kubu yang diperintah dengan memperoleh informasi dari masyarakat yang akan dicurahkan kepada pihak otoritas dan dapat menjadi perolehan informasi yang sama antara pihak otoritas kepada masyarakat. Keterangan informasi yang diberi oleh masyarakat, diantaranya terdapat penyampaian aspirasi yang telah disusun dan ditata sedemikian rupa sehingga dapat

terlampiaskan dengan baik kepada para pembuat kebijakan di struktural pemerintahan. Begitupun sebaliknya sebagaimana informasi yang telah dibuat atau kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah tersampaikan sampai kepada semua elemen masyarakat Indonesia.

Partai politik juga memiliki fungsi-fungsi yaitu menjadi sebuah alat komunikasi pemerintahan, di Indonesia sendiri setiap partai politik memiliki sifat demokrasi yang artinya komunikasi pemerintahan yang disampaikan dan diterima menjadi bersifat dua arah. Berbeda dengan sistem pemerintahan di Korea Utara yang memiliki sifat otokrasi yang dimana pemerintah yang mengatur penuh masyarakat dan segala kebijakan yang dibuat tidak dapat diganggu gugat lagi apa yang sudah diberikan. Peran politik tidak hanya sebagai alat atau jembatan masyarakat untuk menyalurkan suaranya dan juga tidak hanya sebagai sarana dalam mendesak terciptanya demokrasi, melainkan juga sebagai tempat untuk berpijaknya masyarakat untuk belajar memahami pendidikan politik yang memiliki misi agar masyarakat menjadi paham apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat menuding bahwasannya situasi pemerintahan yang terjadi di negara merupakan tugas dan kewenangan dari pemerintah saja, bukan tugas untuk masyarakatnya. Pada dasarnya, pemikiran seperti ini merupakan pemikiran yang salah karena kesejahteraan negara bergantung pada kesejahteraan masyarakatnya itu sendiri. Semakin banyaknya partai politik di suatu negara, maka nilai demokrasi di negara tersebut memiliki nilai demokrasi yang tinggi (Hutagalung, 2017). Pada

akhirnya, partai politik dari awal mulanya menjadi jembatan bagi yang memerintah (Pemerintah) maupun untuk yang diperintah (Masyarakat). Oleh karena itu, ideologi otokrasi menjadi sistem komunikasi pemerintahan yang hanya berjalan satu arah. Apabila didalam struktur lembaga pemerintahan seperti contohnya di lembaga legislatif, yaitu salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dimana ketika terdapat beberapa anggota DPR berasal dari partai A, maka dapat dikatakan bahwa asal partai dari beberapa anggota legislatif tersebut menjadi media dari para pengatur kebijakan. Berbeda pula ketika suatu partai menjadi sebuah partai yang oposisi, bahwasannya partai tersebut dapat menjadi media pengatur kebijakan, tetapi tidak sebesar partai yang pro terhadap pemerintah karena partai oposisi menjadikan peran partainya hanya semata-mata untuk mengkritik dan menilai yang dikerjakan dan dibuat oleh pemerintah.

Pada hal ini, partai politik cenderung memprioritaskan para elit politik dibandingkan untuk kepentingan bangsa dan negara (Hutagalung, 2017). Meskipun begitu, partai politik juga memberikan kesempatan untuk mengajak kepada masyarakat yang tertarik untuk ikut serta dan mendaftarkan dirinya menjadi anggota partai politik. Merekrut calon-calon anggota menjadi sebuah hal yang menjadi pacuan utama dalam mempersiapkan calon pemimpin yang akan memimpin terselenggaranya pemerintahan yang baik, ideal, adil dan bijaksana pada masa yang akan datang. Strategi partai dalam menarik para calon anggota partainya adalah dengan menarik anak-anak muda yang memiliki nilai sifat nasionalisme

yang tinggi sehingga akan menjadi kader muda yang berintegritas. Cara rekrut-merekrut ini memiliki maksud dan tujuan tertentu tentang bagaimana partai-partai tersebut selamat dalam kelangsungan hidup partai tersebut. Persaingan dan perbedaan pendapat menjadikan salah satu sifat dari terbentuknya demokrasi dan merupakan sebuah keadaan yang wajar dikarenakan memberikan sesuatu dampak yang positif. Skema politik tidak hanya diterapkan dan diasosiasikan ketika mendekati Pemilihan Umum, karena seperti halnya organisasi politik, partai politik juga secara berkala memantau segala transfigurasi dan pertumbuhan yang terjadi di dalam komponen masyarakat.

Pemilihan Umum atau yang dikenal dengan sebutan Pemilu memiliki definisi yang identik antara bergantinya pemimpin yang lama dengan beberapa calon pemimpin yang baru dan juga bergantinya gaya kepemimpinannya juga. (Saefuddin, 2020) Pemilu merupakan sebagaimana pasar politik untuk mendapati dan meraih perolehan suara dari masyarakat dari kalangan atas sampai kalangan bawah dengan menggunakan perjanjian sosial agar proses politik yang dilaksanakan oleh para partai politik ini dapat berjalan dengan baik serta partai politik memanfaatkan pemilu untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan demi dapat memaksimalkan akhir tujuan partai tersebut yaitu mendapatkan perolehan suara (Saefuddin, 2020). Kegiatan yang dilakukan oleh partai-partai tersebut adalah dengan melakukan kampanye ke setiap daerah atau tempat agar visi dan misi partai tersebut tersalurkan dengan baik

kepada masyarakat maupun kembali kepada partai itu sendiri. Pemilu dapat dikatakan sebagai pasar politik sebagai wadah untuk masyarakat maupun individu untuk berkomunikasi dalam melaksanakan kontrak sosial antara partai politik dengan rakyat (Saefuddin, 2020). Pemilu merupakan instrumen implementasi kedaulatan rakyat yang berlangsung secara JURDIL LUBER yang memiliki kepanjangan yaitu Jujur, Adil, Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia dalam NKRI yang berlandaskan UUD Tahun 1945 dan Pancasila. Dari tahun ke tahun, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia selalu menerapkan LUBER JURDIL, penerapan seperti ini berdampak baik bagi berlangsungnya Pemilu di Indonesia karena pemerintah dan masyarakat menganggap untuk setiap calon dari kandidat manapun diharuskan untuk menerapkan sistem tersebut.

Secara teoritis, pemilu disebut-sebut sebagai fase pertama dari banyak fase yang berbeda dalam keberlangsungan negara yang demokratis. Oleh karena itu, pemilu merupakan instrumen penggerak metode pola politik yang ada di Indonesia. Hingga saat ini pemilihan umum masih disebut sebagai peristiwa penting kenegaraan. Memang benar, pemilihan umum secara langsung menyangkut semua orang. Melalui pemilihan umum, masyarakat juga dapat menyampaikan pendapat atau keinginannya mengenai politik atau mengenai mekanisme negara. Dalam implementasinya pemilihan umum memiliki 5 sasaran target, diantaranya adalah:

- a. Menjadikan pemilu sebagai bentuk pelaksanaan terciptanya kedaulatan

rakyat

- b. Pemilu menjadi instrumen dalam pembentukan keterwakilan berpolitik
- c. Pemilu selaku akomodasi perwujudan reformasi pemerintahan
- d. Menargetkan pemilu memiliki pemimpin yang memperoleh penerimaan kewenangan
- e. Menjadikan pemilu media partisipasi politik

Demokrasi memberikan keleluasaan bagi setiap orang. Dalam konteks ini pemilu berarti konflik yang muncul dalam tahapan pemilu yang akan diselesaikan oleh lembaga yang mengurus dan menangani demokrasi. Pada akhirnya, demokrasi memiliki keterkaitan satu sama lain dengan pemilu, bahwasannya demokrasi sebagai bagian kehidupan bangsa dan negara yang tidak dapat dipisahkan. (Jumadi, 2014) juga mengatakan bahwa “Dalam ranah demokrasi, kemenangan dalam setiap pemilihan umum memberikan sebuah perspektif yang maju. Bisa menjadi sebuah proses pembelajaran bahwa keinginan mencalonkan diri sebagai pejabat, kepala daerah, menjadi hak setiap orang untuk berjuang meraih amanah yang ingin dicapai”.

Pada kesempatan ini, partai politik yang penyusun gunakan untuk di teliti adalah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA). Penyusun ingin memahami sampai sejauh mana peran partai Hanura pada pemilu 2024 yang akan datang dan penyusun juga ingin mengetahui sampai sejauh mana serta bagaimana langkah-langkah pemimpin partai Hanura menanggapi persoalan komitmen partainya sendiri ketika bersaing dengan partai-partai politik lainnya. Partai Hanura dibentuk dan berdiri pada 21 Desember 2006

yang pada awalnya partai tersebut diketuai oleh Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Wiranto dan saat ini diketuai oleh Dr. (H.C.) H. Oesman Sapta Odang atau akrab yang dipanggil OSO. Pada awal mula partai ini berdiri, pada tahun 2009 yang dibarengi dengan pemilu legislatif pada saat itu, Partai Hanura berhasil mendapatkan 17 kursi di senayan dan memperoleh suara sebanyak 3.922.870 atau setara dengan (3,77%). 5 tahun berlalu, pada pemilu 2014 Hanura kembali mendapatkan 16 kursi di senayan dan memperoleh suara sebanyak 6.579.498 atau setara dengan (5,26%). Setelah itu, partai Hanura mengalami kegagalan ketika pada pemilu 2019 yang gagal merebut kursi di Senayan dikarenakan persentasi ambang batas parlemen dibawah 4% dan hasil suara yang didapatkan hanya 2.161.507 atau sekitar dengan (1,54%) (Wikipedia, Partai Hati Nurani Rakyat, 2023).

Tahun Pemilu	Perolehan Kursi	Perolehan Suara	Persentase
2009	17 Kursi	3.922.870	3,77%
2014	16 Kursi	6.579.498	5,26%
2019	0 Kursi	2.161.507	1,54%

Tabel 1.1 Perolehan Kursi dan Suara Partai Hanura Tahun 2009-2019

Partai Hati Nurani Rakyat sebagaimana sebuah partai yang melekat dan tanggap karena keberadaan partai ini sudah terhitung lumayan lama di negeri ini. Berdirinya partai Hanura merupakan sebuah prestasi-prestasi dari para kadernya yang dinilai memiliki integritas yang cukup baik. Hadirnya Hanura di tengah-tengah masyarakat merupakan sebagai bentuk nyata yang sesuai dengan namanya “Hati Nurani Rakyat” memiliki tujuan yaitu dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali kepada rakyat. Dengan ketanggapannya partai ini, aspirasi dan berbagai pendapat yang disampaikan oleh

masyarakat menjadikan dipercaya oleh publik karena akan kepekaannya yang menyalurkan suara rakyat kepada para pembuat kebijakan. Tidak hanya itu, konsistensi Hanura di tengah masyarakat membuat keputusan-keputusan yang diberikan oleh para pembuat kebijakan memberikan keuntungan kepada rakyat. Dari awal berdirinya partai Hanura pada tanggal 21 Desember 2006 sampai dengan sekarang, terhitung hanya sedikit kadernya yang tersandung kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dapat dikatakan partai Hanura merupakan partai politik yang paling suci dari kasus-kasus yang merugikan negara dan masyarakat. Walaupun partai Hanura masih terbilang partai kecil, penerapan sosialisasi kepada setiap anggota partai tersebut menunjukkan nilai tingkat yang baik dan profesional. Partai Hanura juga tidak pernah memberikan perkataan ataupun penilaian negatif terhadap partai-partai lain serta tidak pernah menganggap remeh lawan partainya. Hanura juga memberikan motivasi kepada setiap kadernya agar tidak mudah terhasut akan sampaian-sampaian yang memberikan dampak negatif dan tidak mudah takut akan persaingan politik karena sifat demokrasi merupakan ciri pemerintahan negara yang seutuhnya dari rakyat dan untuk rakyat.

Konflik internal menjadi faktor sangat sakral yang membuat Hanura menjadi gagal dan mengakibatkan tidak lolos di Senayan, perselisihan antara Mantan Ketua Umum yaitu Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Wiranto yang juga merupakan salah satu tokoh utama yang berperan penting dalam keberlangsungan berdirinya partai tersebut dengan Ketua Umum Hanura

saat ini yaitu Dr. (H.C.) H. Oesman Sapta Odang. Tidak dapat disangka dengan adanya konflik perselisihan internal yang terjadi menyebabkan dampak dan akibat yang serius bagi organisasi partainya. Wiranto dan Oesman Sapta Odang yang dimana kedua orang tersebut memiliki masing-masing kepengurusan yang berbeda dan menjadi konflik internal didalam partai politik (Ariefthusa, 2022). Penelitian tersebut juga meneliti bahwa elektabilitas partai Hanura menjadi menurun karena kepemimpinan OSO yang menyebabkan pada tahun pemilu 2019 partai Hanura gagal lolos di Senayan karena kepemimpinan yang diketuai oleh OSO pada saat itu, tetapi konflik internal partai ini sudah lama terjadi sebelum masa pemilu di tahun 2019, tepat pada awal tahun 2018 (Ariefthusa, 2022). Dengan merosotnya suara partai Hanura, OSO selaku Ketua Umum Partai Hanura menegaskan bahwa partainya gagal memenuhi persentase batas *parliamentary Threshold* yang disebabkan ulah dari Wiranto sendiri yang dimana telah membiarkan partainya dan hanya mengurus urusan pribadinya sebagai Menko polhukam pada pemerintahan presiden Jokowi tahun 2016 sampai tahun 2019 saat itu. Ia menambahkan apabila publik bertanya-tanya mengapa partai Hanura gagal meloloskan dan mengapa mengalami kekalahan di Pemilu legislatif 2019 yaitu silahkan masyarakat tanyakan langsung kepada Wiranto, melainkan bukan bertanya kepada OSO karena kekalahan Hanura disebabkan oleh Wiranto. Berpindah pandangan dari sisi Wiranto, ia mengaku menyesal menetapkan dan memilih OSO menjadi Ketua Umum Hanura yang terpilih secara aklamasi pada Desember 2016 lalu. Ia mengaku

kesalahan terbesarnya adalah menjadikan OSO selaku yang memimpin partai Hanura pada saat itu. Disambung dengan penelitian terdahulu yaitu setelah Presiden Jokowi menetapkan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan didalam kabinet Presiden Jokowi pada tahun 2016, Wiranto menunjuk OSO sebagai pengganti ia untuk menjadi pemimpin partai Hanura berstatus aklamasi sebagai ketua umum pada saat acara Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diselenggarakan oleh petinggi dan penasihat partai Hanura (Ariefthusa, 2022). Akibat dari pergantian kepemimpinan ini, partai Hanura menjadi pecah suara dan memiliki 2 kubu, kubu dari Oesman Sapta Odang dan kubu dari Daryatmo. Kubu Daryatmo merupakan sekumpulan kader partai Hanura yang tidak setuju jika OSO dijadikan sebagai ketua umum karena mereka menganggap bahwasannya kepemimpinan OSO tidak sejalan dengan kepemimpinan yang sudah dijalankan oleh Ketua Umum sebelumnya, yaitu Wiranto. Berbagai aksi dan tindakan yang dilakukan oleh kubu Daryatmo untuk menurunkan OSO dari ketua umum sedangkan dari kubu OSO sendiri menganggap bahwa untuk menurunkan OSO dari ketua umum dan digantikan oleh Daryatmo tidak sah dikarenakan harus mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM. Pada akhirnya tindakan untuk menurunkan OSO dari jabatan ketua umum partai menjadi aksi yang gagal dan sampai saat ini OSO masih menjabat di dirinya sebagai ketua umum partai Hanura.

Oleh karena itu, peneliti yang sekaligus penyusun ingin mengetahui strategi seperti apa yang digunakan partai politik Hanura dalam menghadapi

pemilu pada tahun 2024. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana strategi kampanye yang dipersiapkan oleh partai Hanura untuk mengembalikan masa kejayaan partainya untuk meloloskan kembali ambang *Parliamentary Threshold* seperti pada masa pemilu 2014 sebelumnya dengan hasil persentase minimal 4% agar dimana para kadernya yang mencalonkan sebagai calon legislatif dapat berhasil dan lolos masuk di Senayan serta dapat memenangkan kembali pemilu pada tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, peneliti merumuskan perihal permasalahan pokok yang hendak di bahas, yaitu diantaranya adalah:

1. Bagaimana strategi partai politik Hanura sebelum kepemimpinan Oesman Sapta Odang?
2. Bagaimana strategi partai politik Hanura saat kepemimpinan Oesman Sapta Odang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana strategi partai politik Hanura sebelum kepemimpinan Oesman Sapta Odang.

2. Untuk menganalisis bagaimana strategi partai politik Hanura saat kepemimpinan Oesman Sapta Odang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat, yaitu diantaranya adalah:

a. Manfaat Teoritis:

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman-pemahaman kepada pembaca mengenai seperti apa strategi partai politik Hanura sebelum kepemimpinan Oesman Sapta Odang dan saat kepemimpinan Oesman Sapta Odang

b. Manfaat Praktis:

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran untuk dapat memecahkan permasalahan dalam internal partai politik untuk kembali memenangkan dan meloloskan partai Hanura di pemilu 2024 mendatang.

1.5 Tinjauan Teoritis

1.5.1 Sistem Kepartaian:

(Heywood, 2002) dalam kutipan (Partono, 2008) sistem kepartaian dalam politik merupakan sebuah hubungan dari interaksi para partai politik pada sebuah sistem partai politik yang berlangsung. Sistem kepartaian memberikan bagaimana refleksi dan cerminan mengenai struktur

persaingan antara partai politik yang berupaya mendapatkan kekuasaan pemerintahan. Sistem kepartaian yang digunakan di sebuah negara terdapat tiga model sistem, diantaranya terdapat sistem partai tunggal, sistem dwi partai, dan sistem multipartai. Sistem multipartai dapat tercipta atau dihasilkan apabila sistem proporsional dapat dikombinasikan dengan daerah pemilihan besar karena partai kecil juga memiliki kesempatan untuk memperoleh kursi (Fitriyah, 2012). Sistem partai tunggal merupakan sistem partai di sebuah negara yang hanya memiliki satu partai saja. Pada hal ini, negara yang menganut sistem partai tunggal juga memegang kekuasaan pemerintahan di negara tersebut. Pada umumnya, negara-negara yang menerapkan sistem ini adalah negara yang menganut ideologi fasisme dan ideologi komunisme. Partai tunggal menjadi pemegang kekuasaan di suatu negara yang dimana mengatur dan memerintah warga negara. Sistem kepartaian yang kedua adalah sistem dwi partai yang dimana merupakan hanya terdapat beberapa partai yang eksis di suatu negara atau dapat dikatakan hanya terdapat 2 partai yang memiliki peran penting pemerintahan di suatu negara. Dalam sistem ini, 2 partai ini senantiasa bergantian dalam memegang kekuasaan untuk mengatur pemerintahan (Nurjaman, 2018). Negara Indonesia sendiri menganut sistem kepartaian yang bermodel sistem multipartai yang didalamnya terdapat partai-partai yang terlibat di tengah-tengah masyarakat. Sistem multipartai sendiri memiliki ciri yaitu didalam sebuah negara tidak terdapat satu atau dua partai yang memiliki kekuatan yang cukup, oleh karena itu partai-partai yang

berkoalisi dengan partai lain dan jumlah partai yang dominan di Indonesia yaitu lebih dari dua partai. Sistem pemilu atau *electoral laws* memiliki konsekuensi terhadap derajat keterwakilan atas hasil-hasil pemilu, sistem kepartaian, serta sistem pemerintahan yang diinginkan (Fitriyah, 2012).

Masa demokrasi parlementer diiringi dengan diberlakukannya Dekrit Presiden yang bertujuan menyelesaikan permasalahan antar ideologi partai politik. Mekanisme majelis dalam sistem multipartai ini merupakan majelis parlementer. Parlementer sendiri menjadi tahapan acuan yang lebih dominan dibanding dengan lembaga-lembaga lain. Dengan adanya sistem kepartaian yang bersifat multipartai, dapat dikatakan sistem tersebut memiliki pola pemerintah yang turun naik. Multipartai merupakan sistem kepartaian yang didalamnya terdapat ideologi yang masing-masing berbeda. Meskipun demikian, tidak selamanya ideologi partai memiliki khas yang menarik pemilih. Para pemilih dapat mengubah pilihannya dari suatu partai ke partai yang lainnya (Nurjaman, 2018). Begitu juga dengan ideologi tingkat legislatif, apabila terdapat partai yang memiliki ideologi yang berbeda, tetapi partai-partai tersebut juga dapat berkoalisi dengan partai yang berbeda ideologi jika terdapat kepentingan partai demi untuk melancarkan kebijakan yang dirumuskan di parlemen. Partai-partai yang menang secara konsisten memiliki keunggulan dibandingkan partai-partai lain dalam hal basis popularitas, sokongan dari pemerintah, dan jumlah kursi yang mereka menangkan dalam setiap pemilu. Menurut (Partono, 2008) dalam praktek sistem kepartaian, Negara Kesatuan Republik

Indonesia sudah menjalankan sistem multipartai semenjak negara Indonesia merdeka. Sistem kepartaian tercipta karena munculnya rivalitas antar partai. (Partono, 2008) juga menambahkan sistem politik yang diterapkan Indonesia menuai sistem presidensial dan sistem multi partai menjadikan muncul ketidakharmonisan karena antara legislatif dengan eksekutif. Oleh karena itu, dengan diadakan kompetisi pemilu yang dimana menjadikan sebuah nilai implementasi negara dalam menjaga keharmonisan antara pemerintah maupun yang diperintah. Kompetisi ini berlangsung dikarenakan para partai politik berupaya mengekspresikan beraneka ragam kepentingan kolektif yang berbeda-beda, dan satu diantaranya adalah bermula dari terwujudnya pertarungan pemikiran. Pertumbuhan partai-partai politik di Negara Republik Indonesia dapat ditelusuri melalui penahapan struktur politik yang berkembang. Pengalaman negara Indonesia menunjukkan bahwa telah terjadi 3 kali perubahan dinamis dalam mekanisme politik yang terjadi di Indonesia, bermula menganut demokrasi dan berjalan menjadi otoritarianisme dan berbalik menganut demokrasi.

Negara Indonesia sendiri menganut demokrasi liberal pada pertama kalinya pada tahun 1950 sampai tahun 1955 dan kemudian berganti sistem menjadi demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Kemudian silih berganti pemimpin dikarenakan munculnya sistem otoriter yang menjadikan Indonesia menganut sistem tersebut. Bermula pada tahun 1966, rezim ini dinamakan sebagai rezim orde baru yang dimana sistem pemerintahan pada masa itu berbentuk militer. Sehingga pada akhirnya,

rezim ini tumbang pada tahun 1998 akibat dari tuntutan masyarakat Indonesia. Berakhirnya masa orde baru berpengaruh terhadap bangkitnya kembali sistem demokrasi di negara Indonesia sendiri yang menjadikan sistem pemerintahan yang berjalan berasal dari keputusan rakyat dan dinamakan era reformasi hingga saat ini. Sistem kepartaian dituntut untuk dapat memberikan hasil yang ideal dalam tahap implementasi yang efektif, terutama bagi pemerintah (Sudarsa, 2008). Pemilu pada masa orde baru memedomani pada UU No. 15 Tahun 1969 yang semula muncul gagasan menggunakan sistem distrik, tetapi ditolak dengan alasan dikhawatirkan akan mengurangi kekuasaan pimpinan partai politik, serta muncul ide baru duduknya wakil ABRI sebagai anggota parlemen (Fitriyah, 2012).

1.5.2 Manajemen Partai Politik:

Pada dasarnya, manajemen partai politik adalah elemen penting dalam mengelola sebuah partai politik (Agatha, 2022). Adanya manajemen dalam partai politik, dapat memudahkan berbagai bentuk kepengurusan dalam partai politik. Teori politik merupakan generalisasi dari sesuatu hal yang bersifat politik dan berbagai konsep yang dibahas mencakup sosial, masyarakat, pemerintahan, kekuasaan, pembangunan politik, dan aspek kelas sosial politik lainnya. Partai politik menurut (Jumadi, 2014) akomodasi partai yang dimana menjadi perangkat demokrasi ketika sebuah partai politik dapat memaksimalkan kualitas dan taraf dari demokrasi. Masyarakat Indonesia wajib bersyukur bahwasannya dapat merasakan

kehidupan pada masa pemerintahan yang membebaskan fundamental untuk masyarakatnya pada segala faktor kehidupan. (Rosana, 2012) Pembangunan politik tidak hanya sebagai perubahan politik, tetapi menjadikannya sebagai pemekaran dari kesadaran politik dalam masyarakat yang menjunjung nilai keadilan. (Knapp & Meny, 1998) dalam kutipan (Utama, 2022) berpendapat bahwasannya partai politik berfungsi sebagai tempat untuk rekrutmen politik dan menjadi instrumen integrasi. Pada situasi politik ini tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya pemahaman dan kesadaran di kebanyakan negara yang mendorong reformasi yang menyebabkan runtuhnya masa orde baru dan alih bentuk besar dalam partai-partai politik di negara tersebut. Sejarah menunjukkan bahwasannya demokratisasi dan kelangsungan dalam bentuk kebebasan berekspresi memajukan semangat separuh lapisan masyarakat saat itu, termasuk keinginan untuk membentuk partai politik (Sudrajat, 2016). Kemudian, negara yang menyebut dirinya sebagai negara yang menganut demokrasi, peran fungsinya akan menjadi tolak ukur dan apakah akan menjadi identitas tambahan dari mekanisme politik demokratis ataukah hanya peran tersebut mempunyai arti peran penting untuk masyarakat. Lebih dari 70 tahun negara Indonesia memiliki sejarah partai politik di tanah air, berbagai dinamika dan gelombang menjadikan peristiwa yang terjadi menjadi menarik untuk dikaji lebih jauh. Kini persoalan utama yaitu seperti apa strategi yang perlu dirancang dan dilakukan para partai politik untuk menjadi cerminan langsung dari peran mereka dalam meningkatkan kontribusi demokrasi.

(Hutagalung, 2017) Partai politik seringkali memprioritaskan kepentingan kekuasaan daripada mengedepankan kepentingan masyarakat yang dimana partai tersebut dapat eksis karena dipilih oleh masyarakat.

Lebih tepatnya, masyarakat dapat berlaku berperan dengan keseluruhan untuk memenuhi fungsi esensialnya untuk kepentingan masyarakat dengan cakupan lebih luas merupakan sesuatu hal yang diperlukan (Sudrajat, 2016). Pentingnya keberadaan partai politik di negara-negara yang menamakan dirinya demokrasi telah diakui secara luas dalam bibliografi ilmu politik. Menurut (King, 2003) dalam kutipan (Utama, 2022) menyebutkan peran-peran penting partai politik, yang diantaranya adalah:

- a. Perantara konstitusional antara yang memerintah dan yang diperintah.
- b. Menyampaikan kepada masyarakat mengenai program-program pemerintahan.
- c. mempraktikkan kaderisasi dan pemilihan calon yang berkompeten untuk dikompetisikan pada pemilihan umum.

Manajemen partai politik mencakup berbagai dimensi yang saling terkait dan berperan penting dalam mencapai tujuan partai tersebut. Berikut adalah beberapa dimensi utama dalam manajemen partai politik:

1. Dimensi Organisasi: Manajemen partai politik perlu melibatkan struktur organisasi yang jelas dan efektif. Ini mencakup pembagian tugas, hierarki, dan pembentukan

berbagai unit atau bagian dalam partai, seperti departemen kepemudaan, keuangan, atau kaderisasi. Struktur organisasi yang baik akan membantu pengambilan keputusan dan koordinasi antar bagian dalam partai.

2. Dimensi Kepemimpinan: Kepemimpinan dalam manajemen partai politik sangat penting untuk mengarahkan dan memotivasi anggota partai. Pemimpin partai perlu memiliki visi yang jelas, mampu mengambil keputusan strategis, dan menjaga hubungan yang baik dengan berbagai elemen dalam partai dan dengan masyarakat.
3. Dimensi Kaderisasi: Kaderisasi adalah proses penting dalam partai politik untuk menghasilkan pemimpin masa depan dan memastikan kontinuitas dalam peran dan tujuan partai. Manajemen kaderisasi mencakup rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan kader partai, sehingga mereka memiliki kompetensi dan komitmen yang diperlukan untuk menjalankan visi partai.

Kepentingan umum diperebutkan oleh partai politik melalui pemilihan umum, seperti contohnya parlemen yang dimana setiap partai politik memberikan masing-masing anggotanya untuk dapat berkompetisi dalam pemilu tersebut. Dari sudut pandang manajemen strategik, tujuan utamanya yaitu supaya organisasi tersebut memperoleh hasil yang unggul dalam berkompetitif. Seperti contohnya, ketika terdapat calon yang ingin

maju dalam pemilihan bupati atau gubernur dan masyarakat melihat akan pencalonan dari kandidat tersebut, sehingga eksistensi dari partai politik mengalami kegagalan karena keberadaan partai tersebut dianggap kurang memadai dikarenakan pemilih lebih menyukai calon kandidat yang tidak diusung oleh partai melainkan perseorangan.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Konsep Utama Penelitian

Peneliti ingin mengetahui bagaimana eksistensi partai politik Hanura dapat berjalan dalam pemilihan umum 2024 dan apakah kepemimpinan dari OSO sudah dapat memenuhi kriteria partai Hanura di pemilihan umum tersebut (1) Struktur Jabatan: koordinasi dalam organisasi partai tentang susunan jabatan yang diemban, (2) Sumber Daya Manusia: mendidik kader-kader partai sebelum dicalonkan di lembaga legislatif, (3) Komunikasi: antara pemimpin dan anggota memiliki keterikatan komunikasi yang baik, 3 teori tersebut berkaitan dengan kaitan partai politik Hanura di pemilu 2024.

Dengan apa yang telah disampaikan di atas mengenai teori-teori dalam operasionalisasi konsep, peneliti ingin mengetahui apakah partai politik Hanura sudah cukup eksis di pemilu 2024 pada saat kepemimpinan Oesman Sapta dan apakah sebelum kepemimpinan OSO, partai Hanura sudah cukup eksis di pemilu atau belum cukup eksis pada pemilu-pemilu sebelumnya.

1.6.2 Indikator Penelitian

Peneliti meninjau terdapat beberapa indikator penelitian yang diteliti oleh (Lijphart, 1999) dalam menganalisis teori manajemen partai politik yang dimana terdapat beberapa indikator didalamnya yaitu organisasi yang mencakup struktur organisasi pembentukan bagian dalam partai, kepemimpinan juga meliputi bagaimana kepemimpinan pemimpin partai dalam mengarahkan dan memberikan keputusan yang strategis, dan kaderisasi partai memiliki peranan penting dalam proses politik dikarenakan dapat menentukan bagaimana masa depan partai pada kemudian hari.

Tabel 1.2 Indikator Penelitian Operasionalisasi Konsep

Konsep	Indikator	Keterangan
Manajemen partai politik digunakan untuk mengorganisir partai politik guna mencapai tujuan politik yang ditetapkan. Manajemen partai politik Hanura mencakup elemen-elemen penting, seperti organisasi partai politik, kepemimpinan, dan kaderisasi anggota partai.	Organisasi, dalam partai politik merupakan dimensi pertama dalam manajemen partai politik untuk membagikan struktur organisasi dalam kepartaian yang dimana dapat menghasilkan level-level struktur dalam partai politik.	Hierarki, Pembagian Kekuasaan, pembagian tanggung jawab Struktur hierarkis ini memastikan bahwa pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara terkoordinasi dan terarah (Lijphart, 1999)
	Kepemimpinan partai politik tidak hanya mengarahkan kebijakan dan strategi, melainkan juga memberikan pengawasan dalam moral dan kinerja para anggota partai (Sartori, 2005).	Untuk memastikan bahwa organisasi partai berjalan sesuai rencana, dibutuhkan fungsi pengarahan, pengawasan, dan pencapaian kinerja yang memadai. Fungsi pengawasan ini mencakup pengecekan

		terhadap efektivitas program, penggunaan anggaran, serta pencapaian tujuan.
	Kaderisasi memiliki aspek penting dalam membangun keberlanjutan dan keberhasilan dalam partai politik. Kaderisasi dirancang untuk menciptakan anggota-anggota partai yang memiliki nilai yang berkualitas, kompeten dan loyalitas tinggi. (Sartori, 2005)	Manajemen partai politik mencakup standard rekrutmen anggota, proses rekrutmen anggota, pemberian sanksi, dan kaderisasi untuk memastikan bahwa anggota partai memiliki kompetensi yang diperlukan. Pelatihan kader berfokus pada pembangunan kemampuan kepemimpinan dan pemahaman politik yang sesuai dengan ideologi partai. Partai harus memiliki sistem untuk membina kader agar mampu menjalankan tugas dalam organisasi dan beradaptasi dengan perubahan politik.

1.7 Argumen Penelitian

Bentuk eksistensi dari partai politik Hanura dalam menghadapi pemilu 2024 cukup optimis untuk memenangkan pemilu di 2024, baik pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden. Dapat dilihat dari berita-berita online atau televisi yang menayangkan beberapa argumen yang telah disampaikan oleh Ketua Umum DPP Hanura, Oesman Sapta Odang menjelaskan bahwa partainya siap memenangkan pemilu 2024 dan siap bangkit dari keterpurukan dari pemilu 2019. Kepemimpinan yang

dilakukan OSO memberikan dampak yang baik bagi setiap kadernya, karena OSO memberikan pemikiran dan strategi yang sistematis kepada setiap kadernya untuk dapat menduduki parlemen.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian menurut (Ardi, 2022) cara untuk menggapai refleksi mengenai sesuatu hal yang ingin diteliti melalui perangkat-perangkat tertentu yang terbilang dapat membantu penelitian tersebut. Penelitian digunakan ketika menyelesaikan permasalahan dan mengukur kebenaran dengan tepat serta hasil yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan (Mufleh, 2021). Metode penelitian memiliki 3 tipe penelitian, yaitu diantaranya terdapat tipe penelitian kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran. Biasanya, penelitian kualitatif memperoleh data dengan turun ke lapangan dan melemparkan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber untuk memperoleh data yang valid, sedangkan penelitian kuantitatif merujuk dengan memperoleh data dari angka-angka dan data statistik, terakhir untuk tipe penelitian campuran adalah memperoleh data dengan menggabungkan kualitatif dengan kuantitatif.

1.8.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang ingin diteliti, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pandangan penelitian yang dinilai mudah untuk

diteliti dikarenakan hanya membutuhkan sampel yang tidak banyak dan hasil yang didapat ketika meneliti yaitu subjektif oleh para peneliti-peneliti terdahulu. Tahapan-tahapan penelitian kualitatif melingkupi pemberian pertanyaan-pertanyaan dan mekanisme apa yang telah berdasarkan dari fakta data yang didapatkan dari penelitian lapangan di masyarakat dan dianalisa dengan metode berpikir untuk memperoleh kesimpulan dalam pengambilan informasi.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertempat di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Provinsi DKI Jakarta yang dimana pada pemilu periode 2019-2024 partai Hanura tidak berhasil untuk memperoleh kursi di DPR RI dan juga tidak berhasil lolos di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Partai Hanura dapat disebut bahwa partai ini merupakan partai baru yang dimana pada tahun 2006 didirikan. Partai Hanura juga selalu berkoalisi dengan partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) semenjak pemilu 2014 dan pemilu 2019.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan seseorang yang menjadi narasumber untuk mendapatkan suatu informasi yang menghasilkan data-data. (Arikanto, 2006) dalam kutipan (Utama, 2022) menjelaskan bahwasannya subjek penelitian merupakan subjek yang diminta untuk diteliti oleh penulis

untuk memperoleh sampel. Oleh karena itu, narasumber atau informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu:

1. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura, Dr. (H.C.) H. Oesman Sapta Odang.
2. Wakil Ketua Umum Bidang Perencanaan Kebijakan Strategis Hanura, Patrice Rio Capella S.H.
3. Sekretaris Jenderal Hanura, Benny Rhamdani.
4. Ketua Dewan Penasihat Hanura, Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Marwan Paris.
5. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal, Kepala Staf Partai (KSP) Hanura, Eddie Siregar.
6. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemenangan Pemilu, Dr. phil. Hanurani Prajanto, S. S., M.A.
7. Wakil Bendahara Umum Hanura, Indah Sri Rezeki.
8. Kader Partai Hanura, Sri Suharti.
9. Kader Partai Hanura, Sri Utami.
10. Kader Partai Hanura, Irma Sudarsono.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berisikan data-data penelitian kualitatif, yaitu diantaranya:

- a. Wawancara
- b. Audio Rekaman

- c. Dokumen-dokumen

1.8.5 Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu informasi yang dinilai dapat memberikan data dari penelitian yang ingin diteliti. Berdasarkan yang telah disampaikan di atas, peneliti ingin menjabarkan permasalahan penelitian yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, yang diantaranya yaitu:

- a. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian yang merupakan sebagai narasumber dengan menggunakan alat pengumpulan data secara langsung untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Data primer berikut didapatkan dari data wawancara teruntuk narasumber-narasumber dari pimpinan dan kader partai Hanura.

- b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitian yang merupakan sebagai narasumber. Data sekunder berikut diperoleh dari dokumen dan data informasi milik pihak terkait yang didapat untuk memenuhi dalam membantu memecahkan permasalahan penelitian. Adapun data lainnya

berupa, jurnal, skripsi penelitian terdahulu, buku, *website* resmi partai Hanura atau *website* lainnya yang sesuai dengan penelitian ini.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti yang berperan untuk memperoleh informasi dalam suatu penelitian yang ingin diamati. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, karena peneliti menggunakan penelitian kualitatif, oleh karena itu data dan informasi yang ingin diteliti harus mengarah kepada kondisi yang spesifik. Berdasarkan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu diantaranya:

a. Teknik Wawancara

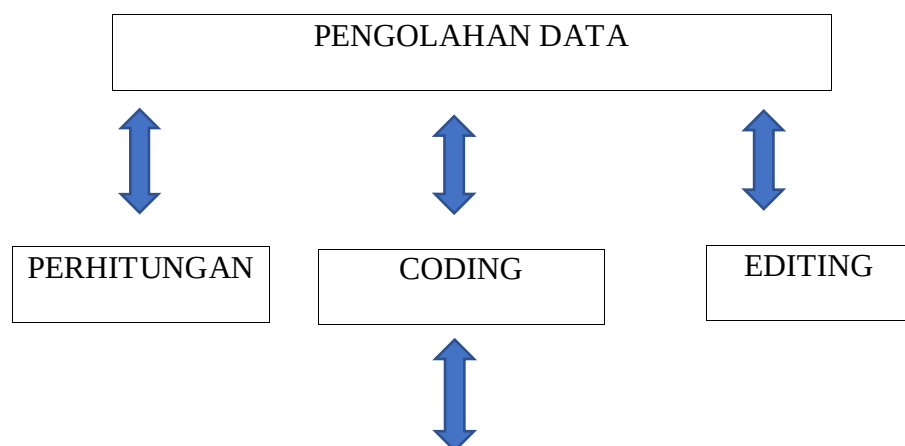
Teknik wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan seseorang ketika menggunakan penelitian kualitatif. Pada halnya, wawancara ialah suatu perbincangan yang memiliki tujuan untuk menghasilkan informasi yang ingin didapatkan. Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan yaitu dengan metode “*in depth interview*” yang dimana peneliti dengan narasumber berbincang secara langsung atau *face to face* dalam menggali informasi-informasi untuk mendapatkan secara penuh data yang ingin didapatkan. Pada akhirnya, dengan teknik wawancara seperti ini dapat memberikan hal-hal yang positif, yang dimana akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

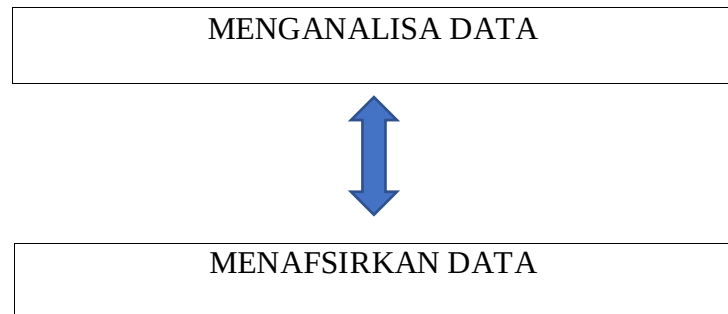
b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan berupa perolehan dari pengambilan data dengan menggali informasi yang akurat dari dokumen-dokumen tersebut yang berpotensi menghasilkan nilai baik bagi penelitian yang sedang berlangsung. Dengan demikian, perolehan dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu, buku, surat, catatan, media online, arsip, dan lain sebagainya yang mengandung data dan informasi yang cukup akurat dan jelas dalam melakukan pencarian pada dokumen-dokumen tersebut.

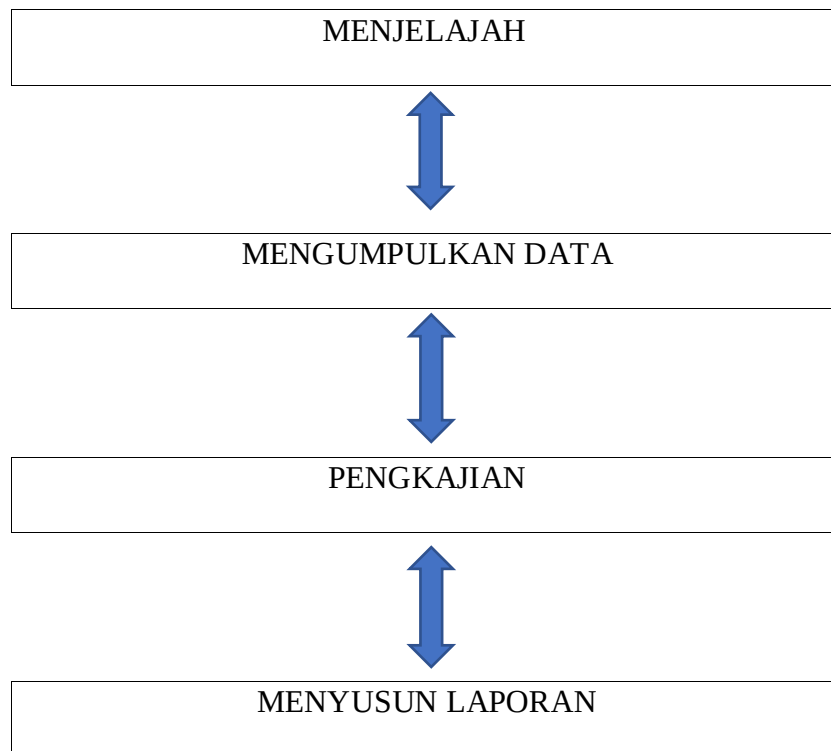
1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam rangka menanggapi permasalahan pada penelitian ini, maka analisis data yang dilakukan penelitian menggunakan penelitian kualitatif dan menghubungkan teori yang digunakan pada hasil dari data kualitatif yang sudah disampaikan di atas.





Gambar 1.1 Analisis Data Dalam Secara Umum (Fauzi et al., 2022)



**Gambar 1.2 Langkah-Langkah Menganalisa Data Dalam Penelitian
Kualitatif (Fauzi et al., 2022)**

1.8.8 Kualitas Data

Pada permasalahan dalam penelitian ini, peneliti tidak membandingkan satu data dengan data lain, dikarenakan data yang telah didapat dari narasumber yang dipilih sudah memberikan hasil yang sesuai dalam penelitian ini. Sementara itu, peneliti hanya membandingkan teori-teori yang sudah dijelaskan pada tinjauan teoritis dan *literature review* yang berkaitan dengan partai politik.